

Receive : 06 December 2025

Revised : 09 December 2025

Accepted : 10 December 2025

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v7i2.114

Vol. 7 No. 2, December 2025, Hlm. 191-196



## Kebijakan Pembangunan di Kota Palu: Penerapan Smart City

\*Fachrul Reza<sup>1</sup>, Alifa Raema Widana<sup>2</sup>

Email : rezadakwah123@gmail.com\*

<sup>1</sup>Universitas Tadulako

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu

### ABSTRACT

*The implementation of the smart city concept in Indonesia is one strategy for sustainable development and optimal public services. Palu City, as a developing city in Central Sulawesi, has begun adopting smart city policies to improve the quality of life of its citizens. This article discusses the background, research methods, implementation, challenges, and recommendations related to development policies in Palu City: smart city implementation using a descriptive qualitative approach and interactive model analysis. This research is based on national literature and policy sources, as well as the results of studies related to smart city implementation in various cities in Indonesia.*

**Keywords:** *Public Policy, Development, Smart City, Information Technology*

## LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, kota-kota di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari proses pembangunan. Konsep smart city mulai banyak diimplementasikan sebagai jawaban atas kebutuhan pengelolaan kota yang lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019). Indonesia sendiri telah mencanangkan Gerakan Menuju 100 Smart City dengan mengajak pemerintah daerah mengembangkan potensi kotanya berbasis teknologi (Bappenas, 2018).

Kota Palu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan publik, terutama pasca bencana alam pada tahun 2018. Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang menimpa Palu menyisakan tantangan besar dalam pemulihan infrastruktur, tata kota, serta layanan dasar masyarakat (Adi, et al., 2020). Implementasi kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city dianggap sebagai satu alternatif inovatif untuk mempercepat proses pemulihan serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin memegang peranan penting dalam pengembangan

kota. Digitalisasi layanan publik, pengelolaan data kota, serta pemanfaatan platform daring telah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di banyak kota, termasuk Palu (Setiadi & Prabawani, 2020). Kota Palu berupaya mengintegrasikan sistem administrasi pemerintahan, layanan kependudukan, serta edukasi menggunakan aplikasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat.

Salah satu alasan utama adaptasi kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city adalah meningkatkan efisiensi birokrasi serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas melalui transparansi data dan informasi. Palu sendiri telah mulai mengembangkan beberapa aplikasi layanan seperti e-government, layanan kesehatan digital, dan sistem pengaduan masyarakat berbasis online (Pemerintah Kota Palu, 2022).

Penerapan kebijakan pembangunan di Kota Palu, khususnya penerapan smart city juga penting dalam memperkuat ketahanan kota terhadap bencana. Sistem peringatan dini, pemetaan daerah rawan bencana, hingga pengelolaan logistik berbasis teknologi merupakan bagian dari inovasi yang sedang dicanangkan (Kurniawan, et al., 2021). Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan adaptasi dan mitigasi bencana untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Namun, hal tersebut tidaklah mudah. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Tantangan terbesar adalah disparitas digital, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital masyarakat (Zon & Budiawan, 2022). Maka, komitmen bersama sangat diperlukan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi warga Kota Palu.

Lebih jauh, adanya dorongan dari pemerintah pusat melalui berbagai program nasional memberikan peluang besar bagi Palu dalam percepatan inisiasi smart city. Keberadaan dukungan regulasi, dana, serta transfer pengetahuan dari kota-kota lain yang sudah lebih maju menjadi faktor penting dalam keberlanjutan kebijakan tersebut (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi kesejahteraan masyarakat

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara mendalam situasi, fenomena, dan

kebijakan terkait implementasi kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur, dokumen resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini dianggap relevan untuk mengungkap dinamika pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor serta memperhatikan faktor sosial, teknologi, dan birokrasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Data dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model interaktif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara komprehensif dari data yang telah dikumpulkan, baik berupa dokumen kebijakan, laporan implementasi, maupun kajian literatur terkait smart city (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, analisis dokumen, serta observasi terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city yang telah diterapkan di Kota Palu.

## **PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pembangunan dalam konteks penerapan smart city di kota palu dimulai dengan penyusunan masterplan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital

untuk pelayanan publik. Pemerintah Kota Palu menetapkan beberapa sektor prioritas diantaranya pemerintahan (e-government), kesehatan, pendidikan, transportasi, dan mitigasi bencana (Pemerintah Kota Palu, 2022). Hal ini bertujuan untuk menyusun program kerja yang terintegrasi dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satu program prioritas adalah digitalisasi administrasi pemerintahan yang diwujudkan melalui pengembangan platform e-government. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi seperti pembuatan KTP elektronik, perizinan usaha, pembayaran pajak, dan pengaduan secara daring (Setiadi & Prabawani, 2020). Transparansi dan efektivitas birokrasi menjadi peningkatan signifikan melalui digitalisasi ini.

Di sektor kesehatan, Kota Palu mulai mengadaptasi layanan kesehatan digital seperti sistem pendaftaran online pasien, konsultasi medis jarak jauh, serta monitoring data kesehatan masyarakat. Digitalisasi ini sangat membantu pada masa pandemi COVID-19 di mana interaksi fisik perlu dibatasi (Kurniawan, et al., 2021). Fasilitas kesehatan di Palu secara bertahap dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi untuk mendukung kebijakan pembangunan tersebut.

Pendidikan digital menjadi fokus selanjutnya, khususnya dalam masa

pemulihan pasca bencana dan pandemi. Pemerintah menyediakan platform belajar daring serta memberikan pelatihan digital kepada guru dan siswa guna meningkatkan mutu pendidikan dan literasi digital di kalangan pelajar (Zon & Budiawan, 2022). Hal ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pendidikan.

Penguatan mitigasi dan respons bencana juga merupakan bagian dari kebijakan pembangunan di Kota Palu dalam konteks penerapan smart city. Pemasangan sistem peringatan dini, pemantauan cuaca berbasis teknologi, serta penggunaan data spasial untuk penanggulangan bencana menjadi strategi andalan (Adi, et al., 2020). Kolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta lembaga swadaya masyarakat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Penerapan smart city tidak terlepas dari tantangan, antara lain kurangnya infrastruktur digital seperti akses internet yang masih terbatas di beberapa wilayah, minimnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi, serta anggaran yang terbatas (Bappenas, 2018). Permasalahan ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi kreatif, termasuk menggandeng pihak swasta dan organisasi internasional.

Aspek literasi digital masyarakat Palu juga masih menjadi pekerjaan rumah. Kurangnya pengetahuan tentang

penggunaan aplikasi digital dapat menghambat efektivitas kebijakan pembangunan di Kota Palu. Oleh karena itu, pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru (Zon & Budiawan, 2022).

Selain memperhatikan aspek teknis, pemerintah Kota Palu juga melakukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city. Partisipasi publik penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyesuaikan program yang dikembangkan (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019).

Rekomendasi dari berbagai studi menunjukkan perlunya evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city, terutama dalam hal efisiensi, dampak sosial, dan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan dengan melihat data penggunaan layanan digital, kepuasan masyarakat, serta efektivitas birokrasi pemerintahan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses implementasi kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city. Sumbangsih dari perguruan tinggi di Palu dalam bentuk riset, inovasi teknologi, dan pelatihan

tenaga ahli sangat mendukung pengembangan ekosistem smart city yang inklusif (Pemerintah Kota Palu, 2022).

Meski masih di tahap awal, komitmen pemerintah Kota Palu terlihat kuat dalam mengembangkan kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city. Keseriusan ini tercermin dalam alokasi anggaran, penyusunan regulasi pendukung, hingga perluasan kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan manajemen kota (Bappenas, 2018). Kendati demikian, tantangan ke depan bukanlah tanpa hambatan. Perubahan pola pikir birokrasi, adaptasi masyarakat terhadap teknologi, serta kelangsungan pembiayaan menjadi isu vital. Program penguatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi harus terus ditingkatkan agar kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city benar-benar mampu menjawab permasalahan kota.

Secara umum, kebijakan pembangunan di Kota Palu, khususnya dalam penerapan smart city diharapkan tidak hanya mendorong pelayanan publik yang efektif, tetapi juga memperkuat ketahanan kota, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Receive : 06 December 2025  
Revised : 09 December 2025  
Accepted : 10 December 2025

P-ISSN : 1858-084X  
E-ISSN : 2808-5213  
DOI : 10.55100/administrator.v7i2.114

## KESIMPULAN

Kebijakan pembangunan di Kota Palu: penerapan smart city merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan, terutama setelah bencana alam hebat. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana, Kota Palu berupaya menciptakan ekosistem kota cerdas yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan model interaktif memberikan gambaran bahwa penerapan kebijakan pembangunan berbasis smart city di kota palu mengalami dinamika yang kompleks, mencakup tantangan infrastruktur, literasi digital, dan partisipasi masyarakat. Namun, dengan komitmen pemerintah, dukungan masyarakat, keterlibatan akademisi, serta evaluasi berkelanjutan, kebijakan ini berpotensi besar untuk menjadikan Palu sebagai kota tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Penekanan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi multipihak menjadi faktor kunci dalam mencapai visi smart city yang mensejahterakan Masyarakat kota palu itu sendiri

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, S., Yulianto, F., & Winardi, R. (2020). "Pemulihan Kota Pasca Bencana dan Penerapan Konsep Smart City".

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.

Bappenas. (2018). Gerakan Menuju 100 Smart City. <http://smartcity.bappenas.go.id>

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). "Laporan Tahunan Smart City Indonesia". [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

Kurniawan, D., Rahman, H., & Anwar, C. (2021). "Mitigasi Bencana Berbasis Teknologi Informasi: Studi Kasus Kota Palu". Prosiding Nasional Teknologi Informasi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

Pemerintah Kota Palu. (2022). "Laporan Implementasi Smart City Palu".

Setiadi, H., & Prabawani, B. (2020). "Peran Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Smart City di Indonesia". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

Zon, M. F., & Budiawan, R. (2022). "Literasi Digital dan Tantangannya di Daerah Perkotaan". *Jurnal Komunikasi Indonesia*.